

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI**
(Studi Pada PT. POS INDONESIA (Persero))

Oleh:

Elly Halimatusadiah

(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung)

Bangun Gunwan

(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung)

Abstract

This research purpose to determine the application of Good Corporate Governance at PT. POS INDONESIA (Persero), to determine the implementation of Accounting Information Systems at PT. POS Indones (Persero), and to determine the application of good corporate governance in order to optimize the implementation of Accounting Information Systems at PT. POS Indonesia (Persero). This research uses descriptive method of analysis which aims to get a fairly clear picture of the object examined. Moreover, the authors use a case study, because the authors only discuss the case and retrieval of data on just one company. This research was conducted at PT. POS INDONESIA (Persero) which is located on Jl. Cilaki No. 73 Bandung. The result showed that the implementation of good corporate governance has been adequate, because it has been supported by the elements of Good Corporate Governance consisting of transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness, and is supported by the stages full of Good Corporate Governance consists of the implementation phase, implementation phase and the evaluation phase, then Implementation of Accounting Information Systems has been adequate, because the input data has been performed with a high level of accuracy, timely, complete, concise, relevant, reliable and comparable. Data processing has also been carried out in accordance with Financial Accounting Standards.

Keyword: Good Corporate Governance, Accounting Information Systems, PT. POS INDONESIA (Persero)

Pendahuluan

Pada era globalisasi ini persaingan dunia bisnis semakin ketat. Banyak muncul perusahaan-perusahaan baru yang memenuhi pasar. Dengan semakin banyaknya penyedia produk dan jasa dalam pasar, maka konsumen lebih leluasa untuk menentukan pilihannya. Semua konsumen pasti menginginkan produk yang berkualitas, mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik, memilih perusahaan dengan manajemen yang baik dan sebagainya. Hal di atas menuntut pelaku bisnis untuk memberikan yang terbaik kepada konsumennya.

Untuk dapat memenangkan persaingan bisnis, perusahaan harus menciptakan iklim manajemen perusahaan yang kompetif dan terorganisir. Setiap aspek yang mendukung hal tersebut harus didukung dengan pengendalian dan

pengelolaan perusahaan yang baik. Sehingga konsumen memperoleh informasi yang dengan benar dan tepat waktu, serta meminimalkan terjadinya kecurangan dalam mengungkapkan informasi. Salah satu pengendalian yang dipakai untuk menunjang hal tersebut adalah *Good Corporate Governance*.

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktu dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance*, (Kaen,2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Sebagai salah satu BUMN, PT. POS INDONESIA (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG telah diwujudkan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) diantaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG dibawah Sekretaris PT. POS INDONESIA (Persero) yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan GCG di PT. POS INDONESIA (Persero). PT. POS INDONESIA (Persero) secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi soft structure maupun dari sisi infrastructure GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG. PT. POS INDONESIA (Persero) telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG seperti Pedoman GCG, *Board Manual*, dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dewan komisaris juga telah memiliki organ pendukung yaitu Komite-komite Dewan Komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengkomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditur, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah serta masyarakat luas.

Dengan terciptanya tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), diharapkan dapat menunjang kegiatan perusahaan salah satunya yaitu sistem informasi akuntansi.

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi.

Dengan terciptanya sistem peraturan dan pengendalian yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diharapkan dapat terciptanya suatu sistem informasi akuntansi yang baik dalam perusahaan BUMN tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu : (1) Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* di PT. POS INDONESIA (Persero)? (2) Bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi di PT. POS INDONESIA (Persero)? (3) Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi?

Kajian Pustaka

Tim GCG BPKP mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu komitmen, aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan, perundangan dan etika.

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi ini dilakukan dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. (Terjemahan, George H. Bodnar dan William S. Hopwood. SIA edisi 9, hal 3).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya atau komponen yang dirancang untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkombinasikan informasi keuangan, yang mempunyai fungsi utama yaitu menghasilkan berbagai informasi yang berkualitas seperti kecermatan, tepat waktu, lengkap dan ringkas

sehingga dapat membantu pihak intern dan pihak ekstern dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi yang baik harus memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu. Hal ini berguna, agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk kepentingan para pengguna baik pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan yang mempunyai kepentingan masing-masing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu untuk mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai *Good Corporate Governance* dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang berdasarkan fakta-fakta yang nampak pada PT. POS INDONESIA (Persero).

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

1. Kuesioner.
Pertanyaan terstruktur dimana alternatif jawaban telah ditentukan, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban.
2. Wawancara.
Melakukan tanya jawab atau wawancara langsung
3. Dokumentasi.
Pengumpulan data yang melalui dokumen yang ada dengan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. POS INDONESIA (Persero) yang beralokasi di Jalan Cilaki No. 73 Bandung, merupakan hasil pengamatan dan pengumpulan data secara berkesinambungan terhadap semua kegiatan yang menyangkut penerapan Good Corporate Governance dan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. Penerapan Good Corporate Governance dan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Memenuhi amanat keputusan Menteri BUMN No: Per01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Perseroan telah melakukan berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan didahului pemanggilan kepada pemegang saham, untuk melakukan persetujuan/keputusan seperti pengesahan RKAP yang disampaikan oleh direksi, pengesahan laporan dan penghitungan tahunan serta pengesahan laba perseroan, menetapkan auditor eksternal, serta menetapkan gaji direksi dan komisaris, yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain menerapkan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham untuk melakukan persetujuan/keputusan, PT. POS INDONESIA (Persero) juga melakukan penerapan kejelasan fungsi yang ada pada perusahaan, seperti di bawah ini:

Komite dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan tugas berupa *Job Description* yang berupa pengangkatan anggota Komite Audit yang sesuai dengan

ketentuan, dan diketahui oleh salah satu anggota Dewan Komisaris untuk membuat laporan kepada Komisaris.

Direksi dilengkapi dengan kejelasan fungsi seperti pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas melalui Struktur Organisasi yang sesuai dan dilengkapi dengan uraian tugas, serta menempatkan pejabat yang sesuai dengan kuaifikasi. Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan kepentingan yaitu dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, seperti membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme bagi Direksi dan senior manajer, melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham, serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi dan melakukan pertemuan antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin dengan tingkat kehadiran 90%, menyusun tata tertib Rapat Direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah Rapat Direksi kepada seluruh Direksi dan membuat mekanisme validasi risalah rapat.

Untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan serta informasi praktek dan penerapan *Good Corporate Governance* kepada *stakeholders*, PT. POS INDONESIA (Persero) telah menyediakan akses melalui media internet yaitu www.posindonesia.co.id.

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan sejalan dengan harapan dari para *stakeholders*, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perusahaan telah membangun pemahaman dan sistem tata kelola perusahaan secara berkelanjutan sebagai kerangka kerja yang diatur dalam kebijakan penerapan *Good Corporate Governance*.

Selain kebijakan tata kelola perusahaan, beberapa manual *Good Corporate Governance* yang telah disusun dan dimiliki PT. POS INDONESIA (Persero) antara lain *Board Manual*, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), *Charter* Komite Komisaris, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), kebijakan Media komunikasi, Kebijakan Manajemen Risiko serta Kebijakan Tata kelola Teknologi Informasi.

Praktek terbaik implementasi GCG dilakukan secara terus menerus dengan mengupayakan peningkatan yang signifikan. Salah satu kegiatan mendukung pelaksanaan implementasi GCG di PT. POS INDONESIA (Persero) adalah dengan melaksanakan kegiatan *Assessment* Penerapan GCG dan pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan GCG serta senantiasa menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian GCG. Untuk memperoleh gambaran yang faktual mengenai kondisi penerapan GCG di PT. POS INDONESIA (Persero) sekaligus mengupayakan perbaikan implementasi GCG yang terus menerus, pada triwulan pertama tahun 2013 dilaksanakan kegiatan *assessment* penerapan GCG 2012. Bekerjasama dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai asesor external, kegiatan *assessment* penerapan GCG telah dilakukan dengan sosialisasi parameter baru yang sesuai dengan Salinan Sekretaris Kementrian BUMN nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Setelah *assessment* dilakukan oleh Tim Independent dari kantor BPKP Kantor Perwakilan Jawa Barat, maka PT. POS INDONESIA (Persero) berinisiatif untuk melakukan *program review* yang meliputi evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan *assessment* sebelumnya dan evaluasi *self assessment* penerapan

GCG dengan didampingi oleh tim dari BPKP dari Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi tindak lanjut atas *assessment* yaitu 86% telah ditindak lanjuti. Selanjutnya pada *self assessment* penerapan GCG yang dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur evaluasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian BUMN memperoleh predikat cukup baik.

Dalam pelaksanaan system informasi akuntansi ini tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai transaksi atau kejadian ekonomi yang merupakan input bagi suatu system informasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas tersebut, tentunya setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi serta deskripsi tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai, seksi, bagian, divisi, atau direksi. Berbagai transaksi dan kejadian ekonomi tersebut akan diproses sehingga akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen maupun oleh pihak eksternal.

Dalam pelaksanaan system informasi akuntansi pada PT. POS INDONESIA (Persero) yang beralokasi di Jalan Cilaki No. 73 Bandung tentunya terdapat beberapa kriteria input data yang digunakan, kriteria pemrosesan data, serta kriteria kualitas output yang dijalankan.

PT. POS INDONESIA (Persero) sudah memiliki sistem input online yang terkomputerisasi, yang memudahkan konsumen untuk mengetahui berapa tarif pengiriman paket barang sebelum barang itu dikirim. Seperti gambar dibawah ini:

TARIF KIRIMAN DALAM NEGERI		TARIF KIRIMAN PAKET / BARANG / POS EXPRES BARANG	
Asal	: BANDUNG (40000)	POS KILAT KHUSUS (Maksimum waktu serah 4 hari)	: Rp. 11.000
Tujuan	: JAKARTA (10000)	POS EXPRESS DOKUMEN (Maksimum waktu serah 1 hari)	: Rp. 14.500
Dimensi	: 20 X 10 X 7 cm3	POS EXPRESS BARANG (Maksimum waktu serah 1 hari)	: Rp. 14.500
Berat	: 1.000 gram		

Gambar 4.1 Hasil Input Pengiriman Barang

Penginput data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal pengiriman barang dapat dilihat sebagai berikut: petugas melakukan penginputan data pengiriman barang sesuai dengan data-data yang telah di tulis oleh pengirim di secarik kertas, setelah itu petugas membuat bukti terima kiriman untuk pengirim. Penginputan data dilakukan oleh petugas ketika pengirim telah menyerahkan data barang yang akan dikirim beserta barangnya, setelah itu petugas menyerahkan barang yang akan di kirim ke kantor pusat pelayanan pengiriman barang. Dilihat dari deskripsi diatas data yang digunakan untuk system informasi akuntansi telah sesuai dengan kejadian ekonomi yang sebenarnya dan telah memenuhi kriteria data diantaranya kecermatan sumber daya manusia dalam membuat faktur bukti penerimaan kas, kuitansi dan sebagainya, tepat waktu, kelengkapan data yang diproses seperti penomoran, tanggal transaksi, tanda tangan petugas, keringkasan, relevan yakni memberi nilai tambah bagi pembuat keputusan, dapat dipercaya yakni bukti-bukti transaksi yang diakui keasliannya dan dapat diperbandingkan antara periode yang satu dengan yang lainnya.

PT. POS INDONESIA (Persero) sudah memiliki sistem proses data yang terkomputerisasi. Setelah pengirim menulis tanggal pengiriman barang, Id pengirim barang, menulis kota asal, kota tujuan, Id penerima barang, kode pos kota tujuan, nama barang, dan tanda tangan pengirim di secarik kertas, kemudian

akan diserahkan kepada petugas kantor pos beserta barang yang akan dikirim. Selanjutnya petugas memproses data barang yang akan dikirim melalui komputer dengan mengentri Nama Produk, Tujuan (Kodepos/Kd Negara), Berat Barang, Nilai Barang, Isi Kiriman, Pembayaran, Id Penerima Barang, Id Pengirim Barang, seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.3 Proses Input Data

Setelah petugas mengentri data seperti pada gambar 4.3 di atas dan data yang di masukkan sesuai dengan yang ditulis oleh konsumen Id konsumen, kemudian petugas melakukan perhitungan barang yang akan dikirim sesuai dengan volumetrik barang tersebut.

Pemrosesan data pada system informasi akuntansi yang diterapkan telah lengkap yaitu berupa pencatatan ke dalam jurnal, dilakukan dengan menulis tanggal transaksi, dengan menyebut rekening yang di debit dan di kredit berikut nilai rupiahnya. Setelah di catat dalam jurnal transaksi tersebut, selanjutnya diposting atau dibukukan ke rekening-rekening buku besar. Selanjutnya angka-angka saldo rekening akan diikhtisarkan ke dalam berbagai macam laporan. Dengan dilaksanakannya pemrosesan yang teratur dan tersimpan dengan baik maka akan menghasilkan informasi terstruktur sehingga mudah untuk dimengerti dan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah pihak Good Corporate Governance.

Gambar Bukti Terima Kiriman

Bukti terima kiriman yang diberikan oleh petugas untuk konsumen pengirim barang adalah salinan yang berwarna kuning. Dan bukti kiriman yang asli disimpan untuk dijadikan arsip.

Output yang dihasilkan system informasi akuntansi berupa laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan cost accounting yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dan pihak luar yang berkepentingan, biaya dan waktu yang dikeluarkan perusahaan lebih sedikit dibandingkan pendapatan yang diterima, semua transaksi diperiksa dengan teliti sehingga laporan yang dihasilkan dapat diandalkan, laporan yang disajikan mudah dipahami, fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dapat dipahami, berkaitan dengan tujuan dilaksanakannya system informasi akuntansi yaitu memberikan informasi akuntansi yang dapat menunjang keputusan manajemen.

Untuk mengetahui bagaimana hasil tanggapan responden terhadap unsur-unsur *Good Corporate Governance* di PT. POS INDONESIA (Persero), dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan kuesioner mengenai tanggapan responden terhadap unsur-unsur *Good Corporate Governance*, maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Transparansi (Keterbukaan)

Melalui wadah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham telah mengadakan pertemuan dan pengambilan keputusan-keputusan perseroan yang bersifat strategis, seperti keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai perusahaan telah dilakukan sesuai dengan keputusan yang di ambil pada Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel *Good Corporate Governance* dengan indikator transparansi (keterbukaan).

2. Accountability (akuntabilitas)

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang menyatakan bahwa organ utama perusahaan terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, pernyataan dalam undang-undang ini telah dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) di dalam organ utama perusahaan.

3. Responsibility (pertanggungjawaban)

Di setiap pengolahan perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) telah disesuaikan dengan prinsip korporasi yang sehat dan perundang yang berlaku, seperti pelaksanaan pengoperasian perusahaan dilakukan sesuai dengan fungsi kinerja masing-masing personalia sehingga hasil dari penoperasian perusahaan

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kinerja dari masing-masing personalia.

4. Independency (Kemandirian)

PT. POS INDONESIA (Persero) telah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanandari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlakudan prinsip-prinsip yang sehat, seperti setiap pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

Kewajaran di dalam hasil laporan keuangan yang ada telah dilakukan oleh akuntan yang profesional dan mempunyai hasil Unqualified (wajar tanpa syarat), selain itu juga PT. POS INDONESIA (Persero) telah dikelola secara dinamis dan profesional sehingga peraturan dan hukum yang berlaku dapat ditegakkan. Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik yang profesional dan independen dan pemeriksaan laporan keuangan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pengolahan kuesioner maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Awareness building

Dengan didasari oleh harapan para pemegang saham dan atas peraturan perundangan yang mewajibkan PT. POS INDONESIA (Persero) untuk menerapkan Good Corporate Governance di dalam setiap kegiatan perusahaan, maka PT. POS INDONESIA (Persero) melakukan penyusunan pedoman untuk menerapkan Good Corporate Governance dengan dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

b. GCG Assessment

PT. POS INDONESIA (Persero) melakukan pengukuran dan pengujian penerapan Good Corporate Governance dengan berpedoman pada KEPMEN BUMN No. 117 Tahun 2002 tentang praktek penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. GCG Building Manual

Upaya untuk mengidentifikasi prioritas penerapan good Corporate Governance telah diterapkan seperti, penyusunan manual atau pedoman Good Corporate Governance dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari BPKP kantor perwakilan Provinsi Jawa BaraT.

2. Tahap Implementasi

a. Sosialisasi

PT. POS INDONESIA (Persero) telah memperkenalkan dengan baik kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan/penerapan Good Corporate Governance, seperti pedoman untuk komisaris dan direksi, piagam komite investasi dan risiko usaha, piagam SPI, kebijakan tekhnologi dan informasi, kebijakan mengenai hak konsumen, kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perseroan kepada kreditor, serta kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perseroan.

b. Implementasi

Kegiatan operasional di PT. POS INDONESIA (Persero) telah dilakukan secara terus menerus dengan berdasarkan pedoman Good Corporate Governance yang ada dan berdasarkan roadmap yang telah disusun.

c. Internalisasi

Upaya untuk memperkenalkan Good Corporate Governance di dalam setiap proses bisnis telah dilakukan dengan baik, seperti pelaksanaan seluruh kegiatan kerja dilakukan berdasarkan pada pedoman Good Corporate Governance Tahap Evaluasi

PT. POS INDONESIA (Persero) telah melakukan evaluasi dengan baik, seperti sejauhmana keefektifan penerapan Good Corporate Governance dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik Good Corporate Governance.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pengolahan kuesioner mengenai tanggapan responden terhadap input data yang digunakan maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Kecermatan (Accuracy)

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal kecermatan telah memadai, mulai dari sumber daya manusia, pembuat faktur bukti penerimaan kas, kuitansi dan sebagainya.

2. Tepat waktu (Timeliness)

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal tepat waktu telah memadai, seperti penginputan data dilakukan pada saat transaksi dimulai, barang yang dikirimkan dapat diterima secara tepat waktu, dan sebagainya dengan adanya data dan bukti yang tepat waktu.

3. Lengkap (Completeness)

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal kelengkapan data telah memadai, seperti nama id pengirim barang, kota pengirim dan tujuan kota pengiriman barang, id penerima barang, tanggal pengiriman, jenis barang, dan sebagainya.

4. Ringkas

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal ringkas telah memadai, seperti data pengiriman barang dapat memudahkan petugas pengirim barang saat pengiriman barang dilakukan. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel sistem informasi akuntansi dengan dimensi Input dan indikator ringkas (no. 6) data diperoleh skor 41 atau sebesar 74,54%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) dalam penerapan data input telah terpenuhi dengan adanya data dan bukti yang ringkas dan mudah dimengerti.

5. Relevan

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal relevan telah memadai, dalam penyajian informasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan.

6. Dapat Dipercaya

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal tepat waktu telah memadai, penginputan data telah sesuai dengan bukti dan di otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

7. Dapat dibandingkan

Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal dapat dibandingkan telah memadai, data yang di input menghasilkan informasi dapat dijadikan sebagai perbandingan antara periode yang satu dengan periode yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pengolahan kuesioner mengenai tanggapan responden terhadap pemrosesan data maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Ketepatan metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam pengolahan data di PT. POS INDONESIA (Persero) telah memadai, hal ini dilihat dari perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data dan kegiatan tata usaha yang dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam pemrosesan data input telah terpenuhi dengan adanya ketepatan metode yang digunakan.

2. Ketepatan prosedur yang digunakan

Prosedur yang digunakan di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam pengolahan data telah memadai, yaitu data akuntansi setelah disortir dan diklasifikasikan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kode rekening. Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam pemrosesan data input telah terpenuhi dengan adanya ketepatan prosedur yang digunakan dengan tepat.

3. Pengendalian dan pengamanan terhadap data akuntansi

Dalam pengendalian dan pengamanan di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam pengolahan data dapat diandalkan, yaitu dengan adanya studi terlebih dahulu terhadap penetapan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan, serta pengolahan data dan pengamanan data telah dilakukan oleh personalia yang telah profesional. pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam pemrosesan data input telah terpenuhi dengan adanya pengendalian dan pengamanan terhadap data akuntansi.

4. Tepat waktu dan pengalokasian

Pengolahan data di PT. POS INDONESIA (Persero) telah dilakukan dengan tepat waktu, pengolahan data dilakukan saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang dihasilkan disampaikan pada waktu yang tepat dan alokasi yang tepat. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variable sistem informasi akuntansi dengan indikator ketepatan metode yang digunakan (no. 17) data diperoleh skor 38 atau sebesar 69.09. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam pemrosesan data input telah terpenuhi dengan adanya ketepatan waktu data dan pengalokasian data yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pengolahan kuesioner mengenai tanggapan responden terhadap informasi yang dihasilkan maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Kegunaan

Sistem di PT. POS INDONESIA (Persero) telah menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dan personil operasi di dalam organisasi. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh

PT. POS INDONESIA dalam data output yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya kegunaan yang memadai.

2. Ekonomis

Seluruh komponen dari suatu sistem di PT. POS INDONESIA (Persero) telah memberikan sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, termasuk dalam semua laporan, pengendalian intern, dan sebagainya yang termasuk kedalam suatu sistem. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel sistem informasi akuntansi dengan indikator ekonomis (no. 19) data diperoleh skor 41 atau sebesar 74,54%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam data output yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya nilai yang ekonomis yang tepat.

3. Keandalan

Sistem yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, yaitu laporan yang disajikan telah sesuai dengan kenyataan dan andal. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel sistem informasi akuntansi dengan indikator keandalan (no. 20) data diperoleh skor 36 atau sebesar 65,54%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam data output yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya keandalan yang sesuai.

4. Pelayanan langganan

Sistem yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah memberikan pelayanan yang baik kepada para pengguna sistem tersebut, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada personalia saat pengoperasian perusahaan sehingga informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan tepat waktu. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel sistem informasi akuntansi dengan indikator pelayanan langganan (no. 21) data diperoleh skor 44 atau sebesar 80%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam data output yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya pelayanan langganan yang baik.

5. Kapasitas

Sistem yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani periode-periode puncak seperti halnya periode aktivitas normal. PT. POS INDONESIA dalam data output yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya kapasitas yang memadai.

6. Kesederhanaan

Sistem yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah disederhanakan, sehingga semua struktur dan operasinya dapat dimengerti serta seluruh prosedurnya telah dapat diikuti dengan mudah. Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam data output yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya kesederhanaan yang tepat.

7. Fleksibel

Sistem yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah dapat mengikuti setiap perubahan yang terjadi dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, hal ini dilakukan agar sistem dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tanggapan responden terhadap sistem informasi akuntansi, dapat di lihat bahwa jumlah skor total yang dicapai dari 11 responden mengenai system informasi akuntansi adalah sebesar 987 atau 74,77% atas perhitungan (Total Skor Yang Dicapai÷Total Skor Maksimal). Melihat dari kelas interval, maka tanggapan responden mengenai system informasi akuntansi terletak pada kelas interval 898-1108, yang berada pada kriteria “memadai”. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut tanggapan responden terhadap pelaksanaan system informasi akuntansi di PT. POS INDONESIA termasuk dalam kriteria memadai, dengan kata lain bahwa pelaksanaan system informasi akuntansi di PT. POS INDONESIA di tinjau dari kualitas input, proses, dan output memiliki kualitas yang memadai.

Berdasarkan penelitian terhadap system informasi akuntansi pada PT. POS INDONESIA (Persero) dapat diketahui bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara memadai dan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi telah dilaksanakan secara memadai pula. Dalam hal Input data, data yang digunakan untuk system informasi akuntansi telah sesuai dengan kejadian ekonomi yang sebenarnya dan telah memenuhi kriteria data diantaranya kecermatan sumber daya manusia dalam membuat faktur bukti penerimaan kas, kuitansi dan sebagainya, tepat waktu, kelengkapan data yang diproses seperti penomoran, tanggal transaksi, tanda tangan petugas, keringkasan, relevan yakni memberi nilai tambah bagi pembuat keputusan, dapat dipercaya yakni bukti-bukti transaksi yang diakui keasliannya dan dapat diperbandingkan antara periode yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pemenuhan kriteria terhadap data yang menjadi input system informasi akuntansi maka akan memudahkan untuk pemrosesannya pula.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa dimensi sebagai berikut:
 - a. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*
PT. POS INDONESIA (Persero) memiliki unsur-unsur *Good Corporate Governance* yang memadai, karena telah mampu melaksanakan transparansi berupa laporan keuangan yang diterbitkan khususnya di media internet. Telah akuntabilitas setelah di audit oleh audit internal setiap triwulan dan oleh auditor profesional diakhir tahun atau di akhir bulan desember, dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemegang saham yang telah menyimpan modal-modalnya di PT. POS INDONESIA (Persero). PT. POS INDONESIA (Persero) terbukti mandiri tanpa campurtangan dari pihak manapun. Dan kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh PT. POS INDONESIA (Persero) *unqualified* (wajar tanpa syarat).
 - b. Tahap-tahap penerapan *Good Corporate Governance*
PT. POS INDONESIA (Persero) telah melaksanakan tahap-tahap dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara memadai, yaitu telah mampu melaksanakan tahap persiapan seperti Awareness Building yang

merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* yang didasari oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Telah dilakukan Good Corporate Governance Assessment dengan berpedoman kepada KEPMEN BUMN No. 117 Tahun 2002. *Good Corporate Governance Building Manual* yang merupakan kegiatan penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG yang dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar. Telah melaksanakan tahap implementasi dengan baik seperti sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Dan terakhir yaitu tahap evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh PT. POS INDONESIA (Persero) guna mengukur sejauhmana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta kepada pihak independen untuk melakukan audit implementasi.

2. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa kriteria sistem informasi akuntansi sebagai berikut:
 - a. Input Data
Pengenputan data yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah mempunyai tingkat kecermatan yang baik, tepat waktu, data akuntansi yang lengkap, ringkas, relevan, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan, maka input yang dijalankan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah memadai atau telah memenuhi kriteria-kriteria dari input sistem informasi akuntansi
 - b. Proses Pengolahan data
Proses pengolahan data telah memadai, karena pencatatan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi yaitu pencatatan ke dalam jurnal, diposting atau dibukukan ke rekening-rekening buku besar. Selanjutnya angka-angka saldo rekening akan diikhtisarkan ke dalam berbagai macam laporan.
 - c. Output yang Dihasilkan
Ouput yang dihasilkan diantaranya laporan keuangan perusahaan, laporan konsolidasi, dan laporan kinerja keuangan perusahaan yang dapat diandalkan, berguna bagi pihak pemakai, ekonomis, sederhana, fleksibel, memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani periode puncak dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Daftar Pustaka

- Baridwan, Zaki. (1993). *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 2*. Yogyakarta
- Bodnar, Goerge H. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 9*. Yogyakarta
- Cushing, Barry E. (1995). *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi* diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih, Jakarta : Erlangga.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance*.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widjayanto, Nugroho (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.